

**KEWARGANEGARAAN DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL: STUDI
LITERATUR**

**Fatimah Azzahra¹, Kamilatul Laily², Mufti Zaenurokhman³, Sofa Zahrotul Aulia⁴,
Ferida Rahmawati⁵**

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

Alamat e-mail: fatimah.azzahra25057@mhs.uingusdur.ac.id

Nomor HP: 088221678049

ABSTRACT

The growth of social media has expanded civic participation while accelerating the circulation of hoaxes and hate speech. This article examines digital citizenship as a preventive approach to fostering critical, ethical, and responsible behavior on social media. The study employed a literature review method by analyzing peer-reviewed journal articles and academic publications published within the last ten years. Data were examined through reduction, thematic grouping, and narrative synthesis. The findings indicate that digital citizenship should not be reduced to technical ability; it also includes information literacy, communication ethics, empathy, legal awareness, digital safety, and civic participation. The novelty of this article lies in a preventive model that integrates information verification, digital politeness, and constructive counter-narratives. Digital citizenship is concluded to be a relevant social education strategy for reducing hoaxes and hate speech on social media.

Keywords: digital citizenship; hoaxes; hate speech; digital literacy; social media

ABSTRAK

Perkembangan media sosial memperluas ruang partisipasi warga, tetapi pada saat yang sama mempercepat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Artikel ini bertujuan mengkaji kewarganegaraan digital sebagai pendekatan preventif dalam membangun perilaku bermedia sosial yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menelaah artikel jurnal ilmiah dan publikasi akademik yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan tema, dan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi mencakup literasi informasi, etika komunikasi, empati, kesadaran hukum, keamanan digital, dan partisipasi sipil. Kebaruan artikel ini terletak pada rumusan model preventif berbasis verifikasi informasi, kesantunan digital, dan kontra-narasi. Kewarganegaraan digital disimpulkan dapat menjadi strategi pendidikan sosial yang relevan untuk menekan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

Kata Kunci: kewarganegaraan digital; hoaks; ujaran kebencian; literasi digital; media sosial

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara warga memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi

dalam kehidupan sosial. Media sosial tidak lagi berfungsi hanya sebagai ruang hiburan, tetapi juga menjadi ruang publik baru tempat warga menyampaikan pendapat, berbagi

pengalaman, dan merespons isu-isu sosial. Dalam perspektif kewarganegaraan digital, ruang daring menuntut kemampuan warga untuk berpartisipasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab karena aktivitas digital berkaitan dengan hak, kewajiban, serta kualitas kehidupan Bersama (Japar et al. 2024). Besarnya peran media sosial membuka peluang partisipasi, tetapi juga menuntut kecakapan warga dalam menyaring informasi, menjaga etika komunikasi, dan memahami risiko keamanan digital.

Salah satu persoalan yang muncul dalam ekosistem digital adalah penyebaran hoaks. Hoaks dapat dipahami sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang dikemas seolah-olah benar sehingga mendorong pengguna mempercayai, membagikan, atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Literatur akademik menunjukkan bahwa informasi palsu yang beredar melalui media sosial dapat memengaruhi opini publik, memperkuat polarisasi, dan mengganggu kualitas demokrasi Utami (2018) juga menemukan bahwa kabar palsu dapat menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada kabar

benar di jejaring sosial. Karena itu, pencegahan hoaks perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan verifikasi, bukan hanya penindakan setelah informasi keliru menyebar luas.

Selain hoaks, ujaran kebencian juga menjadi tantangan penting dalam penggunaan media sosial. Ujaran kebencian tidak hanya berupa kata-kata kasar, tetapi dapat berbentuk stereotip, penghinaan, pelecehan identitas, provokasi, dan ajakan permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Kajian akademik tentang ujaran kebencian di media sosial menunjukkan bahwa masalah ini berkaitan dengan rasisme, prasangka, algoritma, dan pola komunikasi yang menyerang identitas kelompok (Lim 2017). Studi intervensi pencegahan juga menegaskan perlunya pendidikan yang melatih empati, kesadaran dampak, dan keberanian menolak ujaran kebencian secara konstruktif (Wachs, Wright, dan Gámez-Guadix 2024). Dengan demikian, pencegahan ujaran kebencian tidak cukup dilakukan melalui pemblokiran konten atau penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Upaya preventif perlu diarahkan pada pembentukan

kesadaran, sikap, dan kebiasaan digital yang menghargai hak orang lain.

Secara teoretis, kewarganegaraan digital berkaitan dengan kemampuan warga untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, kritis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Choi, Glassman, dan Cristol (2017) menempatkan kewarganegaraan digital sebagai konsep yang memuat etika, literasi, partisipasi, dan kesadaran kritis dalam ruang daring. Kajian tentang misinformasi menunjukkan bahwa intervensi literasi media digital dapat meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengenali informasi palsu (Guess et al. 2020). Dalam praktik evaluasi informasi, lateral reading menjadi strategi penting karena mendorong pengguna membandingkan klaim dengan sumber lain yang lebih kredibel (Wineburg dan McGrew 2019).

Kajian dari Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan hoaks dan ujaran kebencian perlu dibaca dalam konteks budaya komunikasi masyarakat, kebiasaan berbagi pesan, dan tingkat literasi digital. Purwantiningsih, Riyanti, dan

Prasetyo (2022) menekankan hubungan antara kewarganegaraan digital, literasi digital, dan kesantunan bermedia sosial. Amilia Tresnawati, Arief Darmawan (2023) menunjukkan pentingnya literasi digital untuk memerangi hoaks dan ujaran kebencian di masyarakat digital. Muannas dan Mansyur (2020) menambahkan bahwa literasi digital untuk melawan ujaran kebencian tidak cukup bertumpu pada kecakapan teknis dan berpikir kritis, tetapi perlu diperkuat dengan nilai moral, perilaku etis, dan motivasi untuk menjaga ruang publik digital. Sejalan dengan itu, Siregar dan Manurung (2023) menegaskan bahwa informasi yang benar sekalipun dapat berubah menjadi ujaran kebencian jika digunakan untuk merendahkan kelompok tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji konsep kewarganegaraan digital sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Secara khusus, artikel ini membahas: (1) bagaimana konsep kewarganegaraan digital dapat dipahami dalam konteks pencegahan hoaks dan ujaran kebencian; (2) unsur-unsur

kewarganegaraan digital apa saja yang relevan untuk membentuk perilaku bermedia sosial yang kritis dan etis; serta (3) bagaimana rumusan strategi preventif yang dapat diterapkan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Manfaat kajian ini adalah memberikan dasar konseptual bagi pendidik, mahasiswa, pengguna media sosial, dan pembuat kebijakan dalam merancang pembelajaran literasi digital yang tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga tanggung jawab sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur dipilih karena artikel ini bertujuan menyusun pemahaman konseptual dari berbagai temuan terdahulu mengenai kewarganegaraan digital, hoaks, ujaran kebencian, literasi informasi, dan etika komunikasi di media sosial. Sumber data berupa artikel jurnal ilmiah, artikel tinjauan akademik, dan publikasi ilmiah relevan yang diterbitkan dalam rentang 2017-2026. Rentang tersebut dipilih agar kajian memiliki tingkat kemutakhiran sesuai ketentuan referensi sepuluh tahun terakhir. Referensi non-akademik

seperti blog, berita umum, dan situs web populer tidak digunakan sebagai rujukan utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dengan kata kunci “kewarganegaraan digital”, “digital citizenship”, “hoaks”, “fake news”, “misinformation”, “ujaran kebencian”, “hate speech”, “digital literacy”, dan “media sosial”. Literatur yang dipilih dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berupa sumber internasional atau berbahasa Inggris yang digunakan untuk membangun landasan teori tentang digital citizenship, misinformation, hate speech, digital literacy, dan lateral reading. Kelompok kedua berupa sumber Indonesia yang digunakan untuk membaca konteks lokal, seperti kajian hoaks dalam politik Indonesia, literasi digital, kesantunan digital, dan model literasi digital untuk melawan ujaran kebencian di media sosial Indonesia. Pemilihan dua kelompok sumber ini dilakukan agar artikel tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih gagasan

pokok dari setiap sumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah kategorisasi tema, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam beberapa kategori: konsep kewarganegaraan digital, bentuk hoaks dan ujaran kebencian, faktor penyebab penyebaran, kompetensi pencegahan, dan strategi pendidikan. Tahap ketiga adalah sintesis naratif, yaitu menghubungkan hasil kajian untuk menghasilkan rumusan konseptual mengenai kewarganegaraan digital sebagai strategi preventif. Validitas kajian dijaga dengan membandingkan temuan dari beberapa sumber dan menghindari pengambilan kesimpulan dari satu rujukan tunggal.

Karena penelitian ini merupakan studi literatur, artikel tidak menggunakan responden manusia, eksperimen, atau pengolahan data statistik. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis dengan menekankan hubungan antara teori, temuan terdahulu, dan kebutuhan praktis dalam pendidikan warga digital. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak adanya pengujian empiris langsung terhadap perilaku pengguna media sosial. Oleh sebab itu, model preventif yang dirumuskan

dalam artikel ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian lapangan, misalnya survei, eksperimen pembelajaran, atau studi kasus pada komunitas pengguna media sosial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana individu menjalankan hak, kewajiban, dan partisipasi sosial dalam ruang digital. Konsep ini tidak dapat dibatasi pada kemampuan mengoperasikan perangkat atau menggunakan aplikasi. (Choi et al. 2017) menjelaskan kewarganegaraan digital sebagai rangkaian kemampuan, tindakan, dan partisipasi yang memungkinkan seseorang berperan secara efektif dalam komunitas berbasis internet. Dengan pengertian tersebut, warga digital bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga subjek sosial yang harus mampu menilai informasi, menghormati orang lain, memahami risiko, dan ikut menjaga kualitas ruang publik digital.

Dalam konteks media sosial, kewarganegaraan digital memuat setidaknya empat dimensi penting.

Pertama, dimensi literasi informasi, yaitu kemampuan mencari, mengevaluasi, membandingkan, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Kedua, dimensi etika komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan pendapat tanpa merendahkan martabat orang lain. Ketiga, dimensi keamanan dan kesadaran hukum, yaitu pemahaman terhadap risiko privasi, jejak digital, pelanggaran data, dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten. Keempat, dimensi partisipasi sipil, yaitu kemampuan menggunakan ruang digital untuk berdialog, memberi dukungan, mengoreksi informasi keliru, dan membangun solidaritas sosial. Keempat dimensi ini saling berkaitan dalam mencegah hoaks dan ujaran kebencian.

Kewarganegaraan digital penting karena media sosial sering menciptakan ilusi bahwa setiap orang bebas berbicara tanpa batas. Kebebasan berekspresi memang merupakan hak warga, tetapi hak tersebut tetap memiliki tanggung jawab sosial. Pengguna media sosial perlu memahami bahwa unggahan, komentar, dan pesan yang dibagikan dapat berdampak pada reputasi, keamanan psikologis, dan relasi sosial

pihak lain. Oleh sebab itu, kewarganegaraan digital menempatkan kebebasan berekspresi bersama prinsip akurasi informasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesediaan memperbaiki kekeliruan. Dalam posisi ini, kewarganegaraan digital menjadi jembatan antara literasi digital dan pendidikan karakter.

Hoaks dan Ujaran Kebencian sebagai Masalah Kewargaan Digital

Hoaks merupakan masalah kewargaan digital karena penyebarannya tidak hanya menyangkut benar atau salahnya informasi, tetapi juga kualitas partisipasi warga dalam ruang publik. Informasi palsu dapat memengaruhi keputusan sosial, kesehatan, politik, ekonomi, dan hubungan antarkelompok. Tandoc, Lim, dan Ling (2018) menunjukkan bahwa istilah fake news memiliki ragam bentuk, mulai dari satir, parodi, fabrikasi, manipulasi, hingga propaganda. Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna media sosial sering tidak membedakan antara informasi yang salah karena kelalaian dan informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Akibatnya, pesan yang

belum terverifikasi dapat menyebar cepat karena dianggap sesuai dengan keyakinan kelompok atau menimbulkan reaksi emosional.

Ujaran kebencian memiliki karakter yang berbeda, tetapi sering berhubungan dengan hoaks. Hoaks dapat menjadi bahan bakar kebencian ketika informasi palsu diarahkan untuk menyerang kelompok tertentu. Sebaliknya, ujaran kebencian dapat membuat pengguna lebih mudah menerima informasi palsu karena mereka sudah memiliki prasangka terhadap kelompok sasaran. Matamoros-Fernández dan Farkas (2021) menunjukkan bahwa penelitian tentang ujaran kebencian di media sosial perlu memperhatikan hubungan antara teknologi, identitas sosial, dan relasi kuasa. Wachs et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa program pencegahan dapat menurunkan keterlibatan remaja dalam ujaran kebencian daring. Dengan demikian, pencegahan hoaks dan ujaran kebencian harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan dua masalah yang berdiri sendiri.

Di media sosial, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian diperkuat oleh beberapa faktor. Pertama, kecepatan sirkulasi pesan mendorong

pengguna membagikan informasi sebelum memeriksa kebenarannya. Kedua, algoritma platform dapat mempertemukan pengguna dengan konten yang serupa dengan pandangan sebelumnya sehingga memperkuat ruang gema. Ketiga, judul provokatif, gambar manipulatif, dan narasi emosional sering membuat pengguna bereaksi sebelum berpikir kritis. Dalam konteks Indonesia, Lim (2017) menunjukkan bahwa media sosial, algoritma, dan ruang gema dapat memperkuat polarisasi serta ekspresi kebencian dalam kasus politik elektoral. Utami (2018) juga memperlihatkan bahwa hoaks di Indonesia sering memanfaatkan sentimen sosial dan politik yang sudah ada sehingga mudah diterima oleh kelompok tertentu. Karena itu, hoaks dan ujaran kebencian perlu dipahami sebagai bagian dari ketahanan ruang publik digital.

Sintesis Literatur tentang Pencegahan Hoaks dan Ujaran Kebencian

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa pencegahan hoaks dan ujaran kebencian melalui kewarganegaraan digital dapat dirumuskan dalam beberapa tema utama. Tema-tema tersebut tidak

berdiri sendiri, tetapi saling bertanggung jawab. Ringkasan mendukung dalam membentuk warga sintesis literatur disajikan pada Tabel digital yang kritis, santun, dan berikut.

Tabel 1. Sintesis Literatur Kewarganegaraan Digital untuk Pencegahan Hoaks dan Ujaran Kebencian

No.	Tema Sintesis	Temuan Utama Literatur	Implikasi Preventif
1	Literasi informasi dan misinformasi	Kemampuan mengevaluasi sumber dan bukti berperan penting dalam mengenali informasi palsu. Literatur internasional menekankan intervensi literasi media digital, sedangkan studi Indonesia menempatkannya sebagai kebutuhan masyarakat digital (Guess et al., 2020; Tresnawati et al., 2023).	Pengguna perlu dilatih memeriksa penulis, sumber awal, tanggal, bukti, konteks, dan rujukan pembandingan sebelum membagikan informasi.
2	Lateral reading	Evaluasi informasi lebih efektif ketika pengguna keluar dari satu laman dan membandingkan klaim dengan sumber lain yang kredibel (Wineburg & McGrew, 2019; McGrew, 2024).	Pembelajaran perlu membiasakan pencarian silang melalui tab baru, situs cek fakta, dan sumber resmi.
3	Etika, kesantunan, dan nilai moral digital	Kewarganegaraan digital di Indonesia berkaitan dengan literasi digital dan kesopanan bermedia sosial. Pencegahan ujaran kebencian juga membutuhkan moral value dan perilaku etis (Purwantiningsih et al., 2022; Muannas & Mansyur, 2020; Siregar, 2023).	Pengguna perlu menghindari hinaan, stereotip, provokasi, dan komentar yang menyerang identitas, meskipun informasi yang disampaikan benar.
4	Pendidikan anti-ujaran kebencian	Pendidikan dapat memperkuat pemahaman tentang martabat manusia, keberagaman, dan konsekuensi ujaran kebencian. Studi akademik menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis empati dan pencegahan keterlibatan dalam ujaran kebencian daring (Matamoros-Fernández & Farkas, 2021; Wachs et al., 2024).	Sekolah, kampus, dan komunitas perlu mengembangkan kegiatan refleksi, dialog, empati, dan kontra-narasi.
5	Partisipasi sipil digital	Kewarganegaraan digital mendorong partisipasi warga dalam ruang virtual secara bertanggung jawab (Choi et al., 2017; Japar et al., 2024).	Pengguna tidak hanya diam, tetapi dapat mengoreksi informasi keliru, melaporkan konten berbahaya, dan membangun diskusi sehat.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kewarganegaraan digital memiliki fungsi preventif karena menggabungkan kemampuan berpikir kritis, sikap etis, dan tindakan sosial.

Literatur internasional membantu menjelaskan fondasi konseptual, seperti literasi informasi, lateral reading, pendidikan anti-ujaran kebencian, dan partisipasi sipil digital.

Sementara itu, referensi akademik Indonesia memperkuat konteks bahwa pencegahan hoaks dan ujaran kebencian harus disesuaikan dengan kebiasaan bermedia sosial, pola hoaks dalam masyarakat, tingkat literasi digital, serta kesantunan digital. Dengan demikian, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui slogan “jangan sebar hoaks”, tetapi perlu diwujudkan dalam latihan memeriksa sumber, membaca konteks, menjaga bahasa, dan memilih tindakan yang bertanggung jawab.

Temuan penting dari kajian ini adalah bahwa pencegahan hoaks dan ujaran kebencian tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan larangan. Larangan memang penting untuk memberikan batas, tetapi tidak otomatis membuat pengguna memahami cara menilai informasi dan berkomunikasi secara etis. Pengguna perlu diberi pengalaman belajar yang menghadapkan mereka pada contoh nyata, diskusi reflektif, latihan verifikasi, dan simulasi respons terhadap konten provokatif. Pendekatan semacam ini didukung oleh studi intervensi literasi media digital yang menunjukkan peningkatan kemampuan membedakan berita arus

utama dan berita palsu (Guess et al. 2020).

Model Preventif Kewarganegaraan Digital

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini merumuskan model preventif kewarganegaraan digital dengan enam langkah yang disebut TELITI. Model ini disusun sebagai gagasan konseptual yang mudah diterapkan dalam pembelajaran maupun praktik bermedia sosial. Huruf T pertama berarti Tanyakan sumber: pengguna perlu menanyakan siapa pembuat informasi, dari mana sumbernya, dan apakah sumber tersebut memiliki kredibilitas. Huruf E berarti Evaluasi bukti: pengguna perlu melihat apakah informasi didukung data, kutipan, dokumen, gambar asli, atau rujukan yang dapat diperiksa. Huruf L berarti Lacak konteks: pengguna perlu memperhatikan tanggal, lokasi, potongan kalimat, dan kemungkinan manipulasi gambar atau video. Huruf I berarti Identifikasi emosi: pengguna perlu menyadari apakah pesan tersebut memancing marah, takut, jijik, atau benci sehingga mendorong reaksi spontan. Huruf T kedua berarti Timbang dampak: pengguna perlu mempertimbangkan apakah membagikan konten dapat

merugikan individu, kelompok, atau ketertiban sosial. Huruf I terakhir berarti Intervensi secara santun: pengguna dapat memberi klarifikasi, mengajak cek fakta, melaporkan konten, atau membuat kontra-narasi tanpa ikut menyerang.

Model TELITI memperlihatkan bahwa kewarganegaraan digital bekerja sebelum, saat, dan setelah pengguna berinteraksi dengan konten. Sebelum membagikan konten, pengguna memeriksa sumber, bukti, dan konteks. Saat membaca konten, pengguna mengelola emosi agar tidak mudah dimobilisasi oleh provokasi. Setelah menemukan konten bermasalah, pengguna memilih tindakan yang proporsional, seperti tidak menyebarkan ulang, memberikan koreksi, atau melaporkan konten kepada platform. Langkah ini sejalan dengan gagasan lateral reading yang menekankan pemeriksaan lintas sumber dan riset literasi digital yang menunjukkan pentingnya intervensi praktis untuk meningkatkan daya beda terhadap informasi palsu (Guess et al. 2020).

Dalam lingkungan pendidikan, model TELITI dapat diterapkan melalui beberapa kegiatan. Guru atau

dosen dapat menugaskan peserta didik membandingkan dua atau tiga berita tentang isu yang sama, lalu menilai perbedaan sumber, bukti, judul, dan pilihan kata. Peserta didik juga dapat diajak menganalisis komentar media sosial untuk membedakan kritik, sindiran, penghinaan, stereotip, dan ujaran kebencian. Selain itu, pembelajaran dapat diarahkan pada pembuatan konten kontra-narasi, misalnya poster digital, video pendek, atau utas edukatif yang mengajak pengguna memeriksa informasi sebelum membagikan. Kegiatan tersebut membuat kewarganegaraan digital tidak berhenti sebagai konsep abstrak, tetapi menjadi latihan konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tingkat komunitas, kewarganegaraan digital dapat diperkuat melalui budaya saling mengingatkan. Keluarga, sekolah, organisasi mahasiswa, dan komunitas daring dapat membuat kesepakatan sederhana tentang etika berbagi informasi. Misalnya, setiap anggota grup percakapan diminta menyertakan sumber ketika membagikan berita penting, menghindari pesan yang menyerang identitas, dan menerima koreksi jika

informasi yang dibagikan ternyata keliru. Kesepakatan ini penting karena penyebaran hoaks sering terjadi di ruang yang dianggap privat seperti grup keluarga atau komunitas kecil. Dalam ruang tersebut, koreksi perlu dilakukan dengan bahasa yang santun agar tidak menimbulkan rasa dipermalukan.

Relevansi dengan Pendidikan Sosial dan Humaniora

Kewarganegaraan digital memiliki relevansi kuat dengan pendidikan sosial dan humaniora karena membahas relasi antara manusia, teknologi, nilai, dan tanggung jawab sosial. Japar et al. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi ruang penguatan keterampilan kewargaan digital mahasiswa, termasuk pemahaman hak dan tanggung jawab di dunia maya. Dalam pendidikan kewarganegaraan, konsep ini dapat digunakan untuk memperluas pemahaman tentang hak dan kewajiban warga ke ruang digital. Dalam pendidikan bahasa dan komunikasi, konsep ini dapat digunakan untuk melatih pilihan kata, argumentasi, etika diskusi, dan kemampuan memahami konteks. Dalam pendidikan agama dan

karakter, konsep ini dapat dikaitkan dengan nilai kejujuran, tabayyun, penghormatan terhadap sesama, dan pengendalian diri. Dengan demikian, kewarganegaraan digital bersifat lintas bidang dan dapat diintegrasikan ke berbagai mata kuliah atau program pembinaan.

Pencegahan hoaks dan ujaran kebencian juga perlu mempertimbangkan nilai lokal dan nasional. Dalam konteks Indonesia, prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat menjadi dasar etika bermedia sosial. Pengguna media sosial perlu memahami bahwa ruang digital tetap merupakan bagian dari ruang kehidupan bersama. Karena itu, tindakan merendahkan kelompok lain, menyebarkan fitnah, atau memanipulasi informasi bertentangan dengan nilai kewargaan yang menghormati keberagaman. Kewarganegaraan digital menjadi penting karena mempertemukan literasi informasi, kesantunan digital, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial dalam satu kerangka pendidikan warga.

Walaupun demikian, kewarganegaraan digital tidak boleh dipahami sebagai tanggung jawab

individu semata. Platform digital, lembaga pendidikan, pemerintah, media massa, dan organisasi masyarakat juga memiliki peran dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Platform perlu menyediakan mekanisme pelaporan dan moderasi yang transparan. Lembaga pendidikan perlu memasukkan literasi informasi dan etika digital dalam kurikulum. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan literasi digital tanpa mengurangi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Media massa perlu menjaga kualitas informasi dan menyediakan klarifikasi yang mudah dipahami. Sinergi berbagai pihak diperlukan karena hoaks dan ujaran kebencian berkembang dalam ekosistem, bukan hanya akibat perilaku satu orang.

Kebaruan Gagasan dan Implikasi

Kebaruan gagasan artikel ini terletak pada pemahaman kewarganegaraan digital sebagai model pencegahan terpadu terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Sebagian pembahasan literatur digital sering menekankan literasi informasi untuk melawan hoaks, sedangkan pembahasan ujaran kebencian sering ditempatkan pada ranah etika atau

hukum. Artikel ini menghubungkan keduanya melalui gagasan bahwa informasi yang tidak akurat dan komunikasi yang tidak etis sama-sama merusak kualitas ruang publik digital. Oleh karena itu, pencegahan perlu menggabungkan verifikasi informasi, kesantunan digital, empati, kesadaran hukum, dan partisipasi warga.

Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya desain pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan nyata. Materi kewarganegaraan digital sebaiknya tidak hanya berupa definisi, tetapi juga tugas praktik, studi kasus, dan refleksi. Peserta didik dapat dilatih membuat daftar Periksa verifikasi informasi, menganalisis pola judul provokatif, membedakan kritik dan ujaran kebencian, serta menyusun respons santun terhadap konten bermasalah. Dengan cara tersebut, pembelajaran tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membangun kebiasaan berpikir sebelum membagikan konten. Kebiasaan inilah yang menjadi inti pencegahan dalam ruang media sosial.

Implikasi teoretis dari kajian ini adalah perlunya melihat kewarganegaraan digital sebagai

konsep yang dinamis. Perubahan teknologi seperti kecerdasan buatan generatif, manipulasi visual, bot, dan algoritma rekomendasi membuat tantangan hoaks dan ujaran kebencian semakin kompleks. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital perlu terus diperbarui agar tidak berhenti pada etika dasar penggunaan internet. Ke depan, kajian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk menguji efektivitas model TELITI terhadap kemampuan mahasiswa, siswa, atau komunitas tertentu dalam mengenali hoaks dan merespons ujaran kebencian secara konstruktif.

E. Kesimpulan

1. Kewarganegaraan digital dapat menjadi pendekatan preventif dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Konsep ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup literasi informasi, etika komunikasi, empati, kesadaran hukum, keamanan digital, dan partisipasi sipil. Dengan kompetensi tersebut, pengguna media sosial diharapkan mampu memeriksa informasi sebelum membagikannya, mengendalikan emosi ketika

menerima konten provokatif, serta menghindari bahasa yang merendahkan martabat orang lain.

2. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian saling berkaitan. Hoaks dapat memperkuat prasangka dan kebencian, sedangkan ujaran kebencian dapat membuat pengguna lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan permusuhan kelompok. Oleh sebab itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemblokiran atau sanksi, tetapi perlu didukung pendidikan kewarganegaraan digital yang membentuk kebiasaan berpikir kritis dan berkomunikasi etis. Model TELITI yang dirumuskan dalam artikel ini dapat digunakan sebagai panduan awal untuk menanyakan sumber, mengevaluasi bukti, melacak konteks, mengidentifikasi emosi, menimbang dampak, dan melakukan intervensi secara santun.

3. Artikel ini merekomendasikan agar pendidikan formal, keluarga, komunitas, dan platform digital memperkuat budaya verifikasi dan kesantunan digital. Penelitian selanjutnya dapat menguji model preventif ini melalui survei, eksperimen pembelajaran, atau studi

kasus pada kelompok pengguna media sosial tertentu sehingga efektivitasnya dapat diukur secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Amilia Tresnawati, Arief Darmawan, Adhie Surachman. 2023. "Peran Penting Literasi Digital Dalam Memerangi Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Sebagai Tantangan Komunikasi di Masyarakat Digital." *Accident Analysis and Prevention* 183(2):153–64.

Choi, MoonSun, Michael Glassman, dan Dean Cristol. 2017. "What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale." *Computers and Education* 107:100–112. doi:10.1016/j.compedu.2017.01.002.

Guess, Andrew M., Michael Lerner, Benjamin Lyons, Jacob M. Montgomery, Brendan Nyhan, Jason Reifler, dan Neelanjana Sircar. 2020. "A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India." *Proceedings of the National*

Academy of Sciences of the United States of America 117(27):15536–45.

doi:10.1073/pnas.1920498117.

Japar, M., A. R. Casmana, M. M. Adha, dan D. N. Fadhillah. 2024. "Students' perspectives on civic education through digital citizenship in the virtual era." *European Journal of Educational Research* 13(1):89–102. doi:10.12973/eu-jer.13.1.89.

Lim, M. 2017. "Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49(3):411–427. doi:10.1080/14672715.2017.1341188.

Matamoros-Fernández, Ariadna, dan Johan Farkas. 2021. "Racism, Hate Speech, and Social Media: A Systematic Review and Critique." *Television and New Media* 22(2):205–24. doi:10.1177/1527476420982230.

Muannas, dan Muhammad Mansyur. 2020. "Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*

- Komunikasi* 22(2):125–42.
doi:10.17933/iptekkom.22.2.2020.125-142.
- Purwantiningsih, Ary, Dwi Riyanti, dan Danang Prasetyo. 2022. “Digital Citizenship in Indonesia: Digital Literacy and Digital Politeness Using Social Media.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7(3):628. doi:10.17977/um019v7i3p628-637.
- Siregar, Fatimah Sari, dan Yayuk Hayulina Manurung. 2023. “Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial.” *SOMASI : Sosial Humaniora Komunikasi* 4(1):68–76. doi:10.53695/js.v4i1.929.
- Tandoc, Edson C., Zheng Wei Lim, dan Richard Ling. 2018. “Defining ‘Fake News’: A typology of scholarly definitions.” *Digital Journalism* 6(2):137–53. doi:10.1080/21670811.2017.1360143.
- Utami, Pratiwi. 2018. “Hoax in Modern Politics.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22(2):85. doi:10.22146/jsp.34614.
- Wachs, Sebastian, Michelle F. Wright, dan Manuel Gámez-Guadix. 2024. “From hate speech to HateLess. The effectiveness of a prevention program on adolescents’ online hate speech involvement.” *Computers in Human Behavior* 157:108250. doi:10.1016/j.chb.2024.108250.
- Wineburg, Sam, dan Sarah McGrew. 2019. “Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information.” *Teachers College Record* 121(11):1–40. doi:10.1177/016146811912101102.